

RANCANGAN

CATATAN RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN KAPOLRI

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : V
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/tanggal : Kamis, 19 Juli 2018.
Waktu : Pukul 13.15– 17.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri dibuka pukul 13.15 WIB oleh Ketua Komisi III, Drs. H. Kahar Muzakir, dengan agenda rapat membahas mengenai :

- Tindak lanjut atas pengaduan dan kesimpulan rapat pada rapat kerja sebelumnya
- Kebijakan Polri dalam mengatasi aksi teror
- Kebijakan Polri terhadap Anggota Polri yang menjadi korban di lapangan
- Kesiapan Polri dalam menghadapi Penyelenggaraan Asian Games 2018
- Evaluasi Polri dalam melakukan pengamanan selama bulan Ramadhan, Mudik, lebaran dan arus balik serta pengamanan Pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018
- Pengungkapan kasus-kasus aktual

II. POKOK POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Kapolri, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan dalam Rapat Kerja sebelumnya dan tindak lanjut atas Kesimpulan dalam Rapat Kerja tersebut.
- Terkait dengan maraknya aksi terror yang terjadi belakangan ini dimana Polri menjadi obyek dari aksi terror tersebut, langkah-langkah atau kebijakan strategis apa yang telah dilakukan oleh Polri untuk menangkal maraknya aksi terror tersebut sehingga memberikan rasa aman di masyarakat.
- Kebijakan Polri terhadap anggota Polri yang menjadi korban dalam pelaksanaan tugas pengamanan di lapangan.

- Meminta penjelasan Kapolri terkait Kesiapan Polri dalam menghadapi Penyelenggaraan Asian Games 2018
- Evaluasi Polri dalam melakukan pengamanan selama bulan Ramadhan, Mudik, Lebaran dan Arus balik serta pengamanan Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 yang lalu.
- Pengungkapan kasus-kasus aktual yang menjadi isu nasional yang menarik perhatian masyarakat yaitu :
 1. Peredaran narkoba. Dijelaskan juga peta jalur-jalur yang menjadi pintu masuknya jalur peredaran narkoba dan perdagangan orang (*human trafficking*);
 2. Tindak pidana korupsi;
 3. Tindak pidana terorisme;
 4. Pelanggaran hak asasi manusia; dan
 5. Kasus-kasus aktual lainnya yang sedang ditangani oleh Polri.
- Meminta penjelasan terkait dengan OTT di Tulung Agung dan Blitar dimana yang kena OTT adalah orang-orang yang berprestasi dan tingkat keterpilihannya 70% lebih dan KPK melakukan OTT tanpa bantuan Polri. Bahwa anggota Polri baru dilibatkan saat akan memeriksa rumah dinas Bupati Blitar.
- Meminta penjelasan terkait dengan penangkapan atau OTT di rumah menteri, dikhawatirkan suatu saat nanti juga akan dilakukan OTT di DPR.
- Meminta penjelasan terkait dengan ketidakhadiran Irjen Pol Arif Sulistyanto dalam rapat kerja ini. Bagaimana manajemen SDM di Polri, apa kriterianya.
- Meminta penjelasan terkait dengan apabila ada promosi wadir tanpa restu dari Kapolres sebelumnya.
- Meminta penjelasan terkait dengan kasus AKBP Ahmad Kurniawan di salah satu Polres di wilayah Polda Kalimantan Barat, kasus terkait AKBP M Yusuf yang menganiaya ibu-ibu pencuri di minimarket, kasus Kombes Eko Trio yang menghajar 7 anak buahnya dengan helm baja, kasus terkait dengan persoalan kantor polisi bersama, kasus Bripta Sulastriyanto yang memukul keponakannya.
- Meminta penjelasan terkait dengan pengamanan Polri di Pulau Reklamasi yang telah di hentikan. Meminta penjelasan terkait dengan soal penempatan 10.000 polisi dan 5 ribu preman di Teluk Jambe Barat terkait kasus tanah.
- Meminta penjelasan terkait dengan soal asset First Travel dan Abu Tours, bahwa pemberlakuan restorative justice gagal di first travel, berharap restorative justice bisa diberlakukan di kasus Abu Tours, bahwa kasus ini ada kesalahan Kemenag.
- Terkait dengan penyelenggaraan Asian games, Komisi III DPR RI untuk dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan Asian Games.
- Meminta penjelasan terkait dengan tindak lanjut kasus Sdr. Novel Baswedan untuk dipercepat penyelesaiannya.
- Meminta penjelasan terkait dengan antisipasi Polri terhadap aksi terorisme (bom) terutama menjelang pelaksanaan Asian Games.
- Meminta penjelasan terkait dengan perkembangan kasus tanah di Luwuk dan Teluk Jambe, apakah sebelum melakukan pengamanan terkait eksekusi tanah, Polri melakukan pemeriksaan terlebih dulu kasusnya.

- Meminta penjelasan terkait dengan penyelenggaraan Asian games, IMF dan Pemilu.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan mekanisme penghitungan suara saat pileg dan pilpres dimana penghitungan suara pilpres akan di hitung terlebih dahulu dan yang lain belakangan, bahwa hal ini rawan kecurangan karena minimnya saksi dan bagaimana anggaran Kapolri terkait hal ini agar bisa maksimal dalam melakukan pengawasan. Meminta agar anggaran pengamanan Polri untuk Asian Games dipikirkan.
- Terkait pengadaan barjas di Polri, agar merk yang digunakan jangan merk yang tidak ada after salesnya, tidak ada bengkelnya supaya bisa dipakai lebih lama.
- Mendukung gagasan Kapolri terkait adanya UU tentang Perlindungan Penegak hukum. Meminta penjelasan terkait dengan kasus Kapoldes di Ketapang, apakah kapolda tidak mengetahui kasus ini, Meminta penjelasan terkait dengan tindaklanjut kasus kondensat.
- Meminta perhatian khusus dari Kapolri soal pengamanan pileg dan pilpres, soal narkoba dan psikotropika meminta agar polri meningkatkan sarpras untuk mendeteksi narkoba jenis baru, mendukung peningkatan anggaran terkait hal ini.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan evaluasi jabatan, selain prestasi, diharapkan untuk diperhatikan juga soal lamanya yang bersangkutan bertugas.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan korupsi kondensat yang merugikan negara Rp. 32 Trilyun dimana terdakwaanya masih DPO. Meminta agar daftar DPO di published sehingga publik bisa ikut terlibat melaporkan.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan barjas di Polri dimana seharusnya pakai e-catalogue.
- Meminta penjelasan terkait dengan Kapolda Maluku Utara yang memaksakan hasil pilkada, dimana Kapolda meminta KPUD dan Bawaslu setempat untuk melakukan pemilu ulang, karena tidak dituruti maka Polda melakukan penyidikan dan penyalahgunaan wewenang dengan pemakaian perjalanan dinas Bawaslu dimana hal ini tidak ada kaitannya dengan pilkada (menyampaikan laporan kasus Maluku Utara langsung kepada Kapolri)
- Meminta penjelasan terkait dengan perilaku negatif perwira menengah polri, persoalan nikah siri kapoldes Pangkep, apakah hal ini dilarang di Polri, persoalan combatan GAM yang ikut pilkada di Aceh dimana ada beberapa daerah rawan seperti Pidie, Pidie jaya dan Bireun.
- Meminta penjelasan terkait dengan ada kecenderungan oknum polri yang bermain money politic, hal ini sesuai dengan keputusan bawaslu yang melakukan pemungutan suara ulang di salah satu kabupaten di Aceh.
- Meminta penjelasan terkait dengan kebijakan terkait banyaknya kombes di Mabes Polri yang kurang lebih 1500 orang, mau dibawa kemana, perlu adanya terobosan pengembangan SDM di Polri, apakah memungkinkan untuk membentuk Polwil untuk membantu Polda, usulan untuk membentuk satgas intel.
- Meminta penjelasan terkait dengan pengawasan pembangunan di daerah. Meminta penjelasan terkait dengan adanya oknum Ditkrimsus yang membuat resah para pengusaha yang mempunyai proyek di daerah.
- Kapolri diharapkan bisa menempatkan Kapoldes yang mumpuni agar bisa menjaga kepercayaan masyarakat.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan kasus bom di depan kantor tabloid Modus di Aceh agar segera di ketahui pelakunya, soal oknum yang jadi backing pengusaha yang terlibat kasus tanah di Aceh Tamiang.

- Meminta agar Polri melakukan publikasi atas apa yang telah dilakukan, bahwa ada 41 masjid yang telah terpapar ajaran radikalisme, Polri harus bertindak tegas terhadap hal ini apalagi sekarang sudah ada UU Anti Teror yang baru.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan instrumen, kultur dan struktur di Polri. Bahwa masalah terberat di Polri adalah soal kultur dimana belum merata di daerah.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan kasus Kapolres Ketapang bukan kasus pidana karena hanya masalah mis komunikasi bahasa sehingga diminta agar jangan dipukul rata hukumannya. Terkait dengan perlindungan terhadap penegak hukum bahwa banyak anggota Polri yang mendapat ancaman keselamatan saat memeriksa pelaku kejahatan.

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kapolri, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah melakukan inventarisasi dan pengecekan terhadap daftar surat pengaduan Komisi III DPR RI terdapat 9 (sembilan) surat pengaduan yang ditindaklanjuti dengan hasil sebagai berikut :
 1. 3 (tiga) pengaduan tidak benar dan telah selesai
 2. 1 (satu) pengaduan benar dan telah selesai
 3. 5 (lima) pengaduan dalam proses/masih ditindaklanjuti
- Bahwa anggaran Polri di 2019 masih kurang, dimana Polri harus memperbarui sarpras yang ada agar bisa mengimbangi perkembangan teknologi terutama dalam mengantisipasi peredaran narkoba yang jenisnya makin beragam. Polri mengharapkan agar dibantu penambahan anggaran untuk pemilu 2019 sejumlah Rp.5 Trilyun. Bahwa anggaran pileg dan pilpres berasal dari APBN, jika memang masih memungkinkan agar dibantu anggaran untuk polda baru yang telah dibentuk di Kalimantan Utara, bahwa Polri akan membentuk 34 satgas anti terror 88 dari semula 16 satgas,
- Terkait dengan persoalan AKBP Yusuf, diberikan tindakan tegas walaupun setelah di dalam korban adalah pelaku criminal, karena reformasi cultural di Polri adalah penghilangan budaya koruptif, arogansi kewenangan dan kekerasan yang berlebihan. Kasus Kapolres Ketapang diberikan tindakan pencopotan karena melakukan hal di luar kewenangannya karena harus ijin Kapolda dan Kapolri jika melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri (dalam hal ini dengan Negara Tiongkok), dimana yang bersangkutan membuat MoU dengan pihak Tiongkok. Terkait dengan persoalan di Sanggau, adalah kasus pemotongan anggaran oleh atasan. Terkait dengan kasus Kombes Eko bahwa pemukulan terhadap anggota oleh atasan hal ini tidak dibenarkan.
- Terkait dengan persoalan di Teluk Jambe dan Luwuk, untuk Luwuk oknum sudah tersangka dan sudah di tarik ke polda, sedang Teluk Jambe sedang dalam proses.
- Terkait dengan ketidakhadiran Irjen Pol Arif Sulistyanto, yang bersangkutan mewakili Wakapolri berada di Semarang untuk mengawasi seleksi pantukhir.
- Bahwa sedang disusun jabatan fungsional di Polri untuk menampung para kombes yang belum mendapat jabatan
- Terkait dengan persoalan Abu Tours, Polri telah memberi masukan ke Kemenag untuk memberi batasan nominal minimal biaya umroh.
- Terkait dengan persoalan bantuan pengamanan ke KPK, Polri bersifat pasif.
- Kasus pelemparan bom Molotov di sebuah harian di Aceh masih dalam tahap lidik karena kasus hit and run seperti ini lebih sulit di ungkap.
- Terkait dengan persoalan kondensat sudah P.21, namun terdakwa atas nama Honggo masih berada di Singapura dan Polri masih terus bernegosiasi dengan pihak Singapura. Polri tidak bisa menangkap Sdr.Honggo di Singapura karena bukan yurisdiksi Polri.

- Terkait dengan persoalan di Maluku utara sedang dikirim tim Propam Polri untuk meneliti kasus ini. Polri berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam pilkada dengan menerbitkan beberapa telegram terkait hal ini, misalnya Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/269/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang perintah kepada seluruh pegawai negeri pada Polri untuk menjaga netralitas Polri dalam Pilkada serentak 2018. Polri juga menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/252/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang Perilaku netralitas Anggota Polri dalam Pilkada 2018 dan tahapan Pemilu 2019. Polri juga menerbitkan Instruksi Kapolri Nomor : Ins/1/VI/HUK.5.2/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang pedoman berperilaku anggota Polri dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
- Polri membentuk Tim Pengawas Netralitas Polri pada Pilkada Serentak 2018 dengan melibatkan fungsi pengawasan internal baik di tingkat Mabes maupun satuan wilayah yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Panwaslu. Polri juga menyiapkan nomor hotline (021-7218615) dan website (www.propam.polri.go.id) sebagai layanan pengaduan masyarakat bila menemukan oknum polri yang melakukan pelanggaran hukum.
- Dalam mengantisipasi penyebaran isu sara, ujaran kebencian dan berita bohong, Polri melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 - Mengoptimalkan keberadaan Biro Multimedia Divhumas Polri, Ditkamsus Baintelkam Polri dan Dittipidsiber Bareskrim Polri untuk melakukan cyber Patrol, penyelidikan dan penindakan pelaku pembuat dan penyebar hoax serta melakukan counter hoax
 - Membentuk Satgas Patrol Siber untuk mendorong percepatan penanganan hate speech dan paham radikal serta melakukan penindakan secara cepat terhadap pelaku yang mengunggah konten yang melanggar hukum
 - Melakukan profiling terhadap pelaku
 - Selama periode Januari sampai Juni 2018 Polri telah menangani kasus penghinaan, pencemaran nama baik dan penyebaran isu sara sebanyak 98 kasus dengan 15 kasus telah selesai dilakukan penyidikan (P-21), sedangkan kasus ujaran kebencian sebanyak 18 kasus dengan 14 kasus telah P-21 serta kasus berita bohong sebanyak 27 kasus dengan 16 kasus telah P-21.
- Hambatan yang dihadapi Polri diantaranya :
 - Pemblokiran akun media social asing tidak bisa dilakukan oleh pemerintah/Kemenkominfo tetapi harus mendapatkan izin dari pemilik akun tersebut.
 - Menyebar berita bohong dalam undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 belum ada ketentuan khusus yang mengatur berita bohong yang berdampak social, sehingga dalam penegakan hukum penyidik menggunakan UU No. 1 Tahun 1946 yang hanya dapat dilakukan apabila terdapat konten bermuatan penghinaan atau SARA.
- Selama periode Mei sampai Juli 2018 Satgas Pangan Polri telah melakukan penegakan hukum terhadap 412 tersangka dengan 436 kasus terkait bahan pangan, yang terdiri atas 187 kasus terkait Bahan Pokok dan 249 kasus terkait Non Bahan Pokok.
- Pasca kerusuhan rutan Brimob tanggal 8 Mei 2018, bom gereja Surabaya tanggal 13 Mei 2018 dan Mapolrestabes Surabaya tanggal 14 Mei 2018 Polri telah berhasil melakukan penangkapan sebanyak 207 orang pelaku jaringan terror, 20 orang diantaranya meninggal dunia akibat tindakan tegas dari aparat karena melawan petugas saat akan di tangkap dengan rincian sebagai berikut :

- Penangkapan jaringan teror saat terjadi kerusuhan di Mako Brimob sebanyak 8 orang.
- Pengungkapan ancaman aksi terorisme pasca bom Surabaya sebanyak 49 orang
- Pengungkapan jaringan kelompok teror yang melakukan penyerangan terhadap Mako Polda Riau sebanyak 12 orang.
- Pengungkapan ancaman aksi terorisme terkait rencana aksi menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pileg/Pilpres sebanyak 64 orang
- Pengungkapan aksi teror di Pasuruan sebanyak 8 orang
- Pengungkapan aksi penyerangan ke Polres Indramayu, Jabar sebanyak 8 orang
- Pengungkapan di wilayah lainnya sebanyak 58 orang
- Jumlah pengungkapan kasus narkoba yang ditangani Polri sepanjang tahun 2016 sampai dengan bulan Juli tahun 2018 berjumlah 114.475 kasus.
- Kasus menonjol tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Polri yaitu pengungkapan kasus narkoba jenis shabu sebanyak 99 Kg dan Happy Five sebanyak 20.000 butir di Batam dan Aceh dalam kurun waktu dari tanggal 30 Mei sampai dengan 8 Juni 2018, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap 12 orang tersangka sindikat internasional (Malasyia) yang menyelundupkan narkotika melalui Perairan Batam dan Aceh.
- Jumlah pengungkapan kasus TPPO yang ditangani Polri dari tahun 2014 sampai dengan Juli 2018 berjumlah 543 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 761 orang.
- Data penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Polri dari tahun 2015 sampai dengan Juni 2018 adalah sebanyak 5.695 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 5.907 orang. Nilai kerugian negara dari kasus korupsi yang berhasil di ungkap penyidik Polri pada tahun 2017 berjumlah total Rp. 2.987.673.849.402,-. Dari jumlah ini yang berhasil diselamatkan dalam proses penyidikan adalah sebesar Rp. 1.887.603.913.226,- . Sedangkan sepanjang tahun 2018, nilai kerugian negara dari kasus korupsi yang berhasil di ungkap penyidik Polri adalah sebesar Rp. 992.840.294.646,-. Dari jumlah tersebut, keuangan negara yang berhasil di selamatkan dalam proses penyidikan adalah sebesar Rp. 286.121.706.028,-.
- Kasus Tipikor menonjol yang di tangani Polri adalah pengungkapan Tipikor dalam pemberian fasilitas kios pada Garut Super Block (GSB) dari Bank Jabar Banten Syariah (BJBS).
- Sinergi antara Polri, Kejaksaan dan KPK dalam rangka pencegahan Tipidkor dilakukan melalui kegiatan :
 - Pelatihan bersama dalam rangka upaya pencegahan Tipidkor, seperti pelatihan penanganan Tipidkor dengan subjek hukum korporasi
 - Sosialisasi dan asistensi terhadap kementerian/lembaga/BUMN/BUMD yang dilakukan bersama kejaksaan dan KPK
 - Pembekalan kepada Calon Kepala Daerah sebelum pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dengan materi tentang pencegahan tindak pidana korupsi
 - Kampanye bersama anti korupsi kepada asosiasi perguruan tinggi se-Indonesia dan Asosiasi Pemerintah kota se-Indonesia
 - Sosialisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam pencegahan tipidkor.
- Dalam periode bulan Mei 2017 sampai dengan Juli 2018 Satgas Pangan Polri telah melakukan pengungkapan dugaan penyimpangan tata niaga pangan sebanyak 436 kasus, yang terdiri dari 187 kasus bahan pokok dan 249 kasus non bahan pokok dengan 411 orang tersangka. Namun dari hasil lidik kasus yang telah terungkap tersebut belum ditemukan pelaku yang berasal dari Kementerian/lembaga.

- Kasus Kondensat telah dinyatakan lengkap (P21) pada tanggal 8 Januari 2018. Kasus ini belum dapat dikirimkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) karena JPU meminta seluruh tersangka dan barang bukti dilimpahkan secara bersamaan. Kendala yang dihadapi penyidik adalah salah satu dari 3 tersangka atas nama Honggo Wendratno tidak ditemukan keberadaannya. Saat ini telah dimasukan dalam DPO, permintaan Red Notice kepada Interpol dan mengajukan pencabutan passport ke Ditjen Imigrasi.
- Dalam melakukan penanggulangan tindak pidana terorisme, Polri menggunakan dua strategi pendekatan yaitu Hard Approach dan Soft Approach. Hard Approach dengan melakukan upaya pre-emptif strike yaitu pencegahan terhadap aksi terorisme dengan melakukan penegakan hukum melalui due process of law atau melalui sistem peradilan pidana sedangkan soft approach dilakukan dengan kontra ideologi, kontra radikalisasi dan deradikalisasi
- Selama periode Januari s.d Juli 2018, jumlah anggota Polri yang menjadi korban dalam pelaksanaan tugas sebanyak 31 orang terdiri dari 22 orang luka dan 9 orang meninggal dunia. Jenis jenis penghargaan untuk anggota Polri yang menjadi korban dalam melaksanakan tugas antara lain :
 - KPLBA (Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta)
 - KPLB (Kenaikan Pangkat Luar Biasa)
 - Promosi mengikuti pendidikan
 - Promosi Jabatan
 - Tanda penghargaan berupa Pin Penghargaan (emas, perak dan perunggu) dan Piagam Penghargaan
- Polri juga memberikan santunan kepada korban dalam tugas pengamanan di lapangan melalui pengurusan asuransi sosial sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN.
- Polri telah menggelar Operasi Ketupat 2018 selama 18 hari mulai dari tanggal 7 s.d 24 Juni 2018 untuk mengamankan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Operasi ini melibatkan 176.397 personel, terdiri atas personel Polri, TNI, Kemenhub, Kemenpupera, Kemenkes, Pertamina dan stakeholders lainnya. Operasi Ketupat 2018 mengedepankan kegiatan preemtif, preventif dan penegakan hukum dengan empat fokus utama yaitu Kamseltibcar Lantas, ketersediaan dan stabilitas harga pangan, ancaman terorisme dan gangguan kamtibmas lainnya.
- Untuk pengamanan Pilkada Serentak tahun 2018, Polri masih telah menggelar Operasi Mantap Praja 2018 yang di laksanakan di 171 daerah dengan perincian yaitu 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 kota.
- Bahwa Polri akan melaksanakan pengamanan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dengan menggelar “Operasi Among Raga 2018” yang mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif serta didukung kegiatan intelijen dan penegakan hukum selama 16 hari mulai dari tanggal 18 Agustus s.d 2 September 2018 pada 4 (empat) wilayah Polda yaitu Polda Metro Jaya, Polda Sumsel, Polda Jabar dan Polda Banten. Kegiatan pengamanan akan di fokuskan pada 3 (tiga) area yaitu :
 1. Venue Pertandingan
 2. Venue Non Pertandingan (bandara, hotel, kantor Inasgoc, kantor Dewan Olimpiade Asia, Media Center, lokasi wisata, sekretariat dll).
 3. Manajemen lalu lintas
- Langkah langkah yang telah dilakukan Polri dalam menghadapi pengamanan Asian Games XVIII tahun 2018, antara lain :

- Melaksanakan Operasi Cipta Kondisi melalui Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KKYD) dengan sasaran premanisme, curat, curas, miras, narkoba, senjata tajam dan kejahatan jalanan lainnya.
- Menyusun Renops dan Renpam penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018
- Menunjuk para Kapam Obyek dan petugas pam venue
- Melaksanakan Rakor lanjutan dengan Pospel Inasgoc dan Kementerian/Lembaga di Jakarta, Bandung dan Palembang
- Penyelenggarakan Test Event tanggal 8 s.d 18 Februari 2018
- Melaksanakan Rakor kesiapan pengamanan Torch relay yang di hadiri oleh 18 Wakapolda dan Karo Ops Polda yang terlibat pengamanan torch relay
- Melaksanakan Laptraops di masing masing Polda
- Melaksanakan rapat koordinasi one on one seluruh cabang olah raga dan venue dengan melibatkan venue manager dan Kapam obyek
- Melakukan peninjauan lapangan bersama sama dengan Tim Lengkap Inasgoc
- Pengamanan terhadap barang/logistik kebutuhan venue/cabor yang masuk ke kawasan GBK dan venue lainnya sejak tanggal 1 Juli 2018
- Melaksanakan pengamanan torch relay dari tanggal 17 Juli s.d 18 Agustus 2018.
- Terkait pengungkapan kasus kasus aktual yang sedang di tangani Polri dan menjadi perhatian masyarakat adalah sebagai berikut :
 - Penanganan kasus pencemaran Lingkungan Hidup di perairan Teluk Balikpapan dimana Ditremkrimsus Polda Kaltim telah mengungkap kasus Pencemaran Lingkungan Hidup di Perairan Teluk Balikpapan yang terjadi pada tanggal 29 Maret 2018 yang mengakibatkan kebakaran dan meninggalnya 5 (lima) orang.
 - Penanganan kasus pelemparan batu di JPO Jalan Tol dimana selama bulan Januari s.d. Juli 2018 telah terjadi 4 kasus pelemparan batu terhadap pengendara mobil di JPO jalan tol yang meliputi :
 1. Tol Jakarta – Cikampek 1 kasus dengan 1 korban meninggal dunia
 2. Tol Jagorawi sebanyak 2 kasus yang mengakibatkan kaca mobil pecah
 3. Tol Jakarta – Merak 1 kasus yang mengakibatkan 1 orang luka
 - Polri telah berhasil mengungkap sebanyak 2 kasus pelemparan batu di jalan tol dan 2 kasus lainnya masih proses penyelidikan.
 - Penanganan Kasus Penistaan Agama di Musi Rawas Sumsel dimana Polres Musi Rawas Polda Sumsel telah berhasil mengungkap perkara penistaan agama yang dilakukan dengan cara memposting di media sosial dengan melakukan penangkapan terhadap tersangka AF
 - Penanganan kasus Pencurian dengan kekerasan terhadap Dirjen Kemenpupera dimana Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil menangkap dua orang tersangka FS (MD) dan AG
 - Penanganan kasus tenggelamnya kapal KM Arista di Perairan Pulau Barrang Lompo Sulsel dimana Polda Sulsel telah menangkap dan menahan tersangka M alias DK selaku nakhoda Kapal KM Arista pada tanggal 14 Juni 2018
 - Penanganan Kasus Tenggelamnya Kapal KM. Sinar Bangun di Danau Toba dimana Polda Sumut telah menetapkan 4 orang tersangka yaitu PSS (nakhoda), KS (Pegawai Honorer Dishib), GFP (Kapos Pelabuhan Simaninda, PNS Dishub Samosir) dan RS (Kabid Angkutan Sungai dan Danau Perairan).
 - Penanganan kasus tenggelamnya Kapal KMP. Lestari Maju di Perairan Kep. Selayar, Sulsel dimana polda Sulsel telah menetapkan 3 orang tersangka yaitu KM (Syahbandar), AS (Nakhoda) dan HY (Pemilik Kapal)

3. Komisi III DPR RI akan menyampaikan kepada Kapolri beberapa surat masuk dari masyarakat yang disampaikan kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang Polri, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI pada Masa Sidang berikutnya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi III DPR RI mengapresiasi Polri dalam melakukan pengamanan selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H serta pengamanan selama pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 yang lalu sehingga berjalan dengan lancar, aman dan damai.
2. Komisi III DPR RI mendukung peningkatan anggaran Polri tahun 2019 diantaranya untuk pengamanan proses Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada bulan April 2019, serta pembiayaan Polda baru Kalimantan Utara, penguatan Densus 88 serta sarana dan prasarana dalam menghadapi kejahatan *cyber* dan narkoba.
3. Komisi III DPR RI mendukung Polri dalam melaksanakan pengamanan penyelenggaraan Asian Games 2018 dengan menggelar Operasi Among Raga 2018 dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif serta didukung kegiatan intelijen dan penegakan hukum.

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB

